

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial merupakan fungsi penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam proses interaksi sosial. Media sosial membantu memperkuat hubungan antara individu dan kelompok. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, seperti bernafas, kata Everett Kleinjan dari East West Center Hawaii. Selama manusia ingin hidup, media sosial diperlukan.¹

Banyak pakar berpendapat bahwa media sosial adalah bagian penting dari hidup bermasyarakat. Menurut Wilbur Schramm, masyarakat dan media sosial adalah satu sama lain.² Karena masyarakat tidak mungkin terbentuk tanpa media sosial, dan manusia tidak mungkin mengembangkan media sosial tanpa masyarakat.

Secara ringkas, David K. Berlo mengatakan bahwa media sosial membantu dalam interaksi sosial untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain serta untuk menemukan keseimbangan dengan masyarakat. Harus diakui bahwa beberapa orang tidak siap untuk berdemokrasi. Agar demokrasi menjadi kenyataan, bukan hanya slogan, kita harus berpikir tentang kegiatan anggota masyarakat dalam proses memerintah diri sendiri. Masyarakat bebas demokratis tidak akan pernah terwujud jika masyarakat tidak mengakui dan menerapkan prinsip demokrasi. Di media sosial berjejaring, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube,

¹Pengantar Komunikasi Organisasi oleh Tsunu Wahyudhi, Marto Silalahi, Dyah Gandasari, Maya Sari, Sahri Sahri, Pratiwi Bernadetta Purba, Anggri Puspita Sari, dan Janner Simarmata, 2020, Yayasan Kita Menulis.

²Menurut Yetty Oktarina dan Yudi Abdullah, Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik, diterbitkan pada tahun 2017, halaman 49.

hubungan visual, tekstual, dan verbal memudahkan komunikasi publik. Pesan yang dimaksudkan untuk memengaruhi publik dikomunikasikan melalui pendekatan komunikasi politik. Media sosial pasti digunakan untuk berkomunikasi oleh pemerintah, partai politik, aktivis, dan profesional. Partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum tentang kegiatan politiknya dan memanfaatkannya untuk kepentingan politik karena memberi mereka kekuatan untuk mempengaruhi berbagai audiens. Dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, kepentingan politik menjadi bagian dari penggunaan media sosial. Karena mereka murah, mudah diakses, dan memungkinkan komunikasi langsung dengan komunikator, Media sosial baru-baru ini menjadi komponen penting dari komunikasi politik di Indonesia.³

Media sosial tetap memainkan peran penting di tengah arus globalisasi yang kuat saat ini. Media sosial berbasis internet, yang memungkinkan semua data diakses melalui perangkat elektronik, telah mendorong kemajuan media. Hingga saat ini, media sosial seperti Instagram masih berfungsi untuk mendukung demokrasi. Masyarakat menggunakan media sosial untuk menyebarkan kritik dan aspirasi mereka untuk memperbaiki negara demokrasi.

Setiap hari, platform media sosial seperti Instagram berbagi berita terbaru dan aktual. Oleh karena itu, masyarakat mengetahui masalah saat ini, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Media sosial juga membantu masyarakat

³ Sukma Alam, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik*. Jakarta. 2021. Hlm. 69.

sipil berbagi kritik, aspirasi, saran, dan masukan bermanfaat melalui kolom opini kepada pihak berwenang dan masyarakat secara keseluruhan.

Akibatnya, media sosial menjadi sangat penting untuk membangun sistem kontrol sosial yang melibatkan pemerintah dan rakyat dalam demokrasi. Ini ditunjukkan oleh banyaknya fungsi yang dimainkannya dalam kontrol sosial, salah satunya adalah sebagai anjing penjaga, yang sering disalahartikan sebagai anjing penjaga. Selama ini, tampaknya pers berada di posisi yang bertentangan atau bertentangan dengan pemerintah. Namun, tanggung jawab pers adalah mengawasi pemerintah, terutama lembaga eksekutif.⁴

Sebagai produk pers, media sosial dapat mempengaruhi dan mengawasi kebijakan publik. Sebaliknya, karena fungsi mereka sebagai media sosial, media sosial sangat memengaruhi politik dan pemerintahan. salah satu pilar demokrasi. Demokrasi akan terhambat jika tidak apabila kebebasan jurnalistik dibatasi, seperti yang terjadi di Indonesia selama Orde Baru dari 1967 hingga 1998.⁵

Pemerintah setempat dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang masalah penting dan tindakan yang telah dan belum dilakukan terkait fungsi dan tanggung jawabnya. Pada akhirnya, ini berujung pada kebijakan publik. Thomas R. Dye mengartikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.⁶

⁴Politik Media Masa Debi Saputra, Komunikasi Masa, Komunikasi Politik, dan Sosial Budaya. Dunia Rakyat Merdeka, 2019, halaman 19.

⁵ *Ibid*, Hlm. 13.

⁶ Basri Seta, *Sistem Politik Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2012, hlm. 6

Menurut teori ini, menyatakan bahwa media sosial harus mengawasi tindakan pemerintah agar negara menjadi adil, aman, makmur, dan tentram, sebaliknya, media sosial harus diminta untuk menunjukkan kekurangan atau kegagalan pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan kritik, saran, dan aspirasi yang bermanfaat. Karena fungsi media sosial sebagai alat untuk mengawasi kebijakan publik, mereka harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan lembaga tersebut sesuai dengan hukum. Selain itu, media sosial akan memberikan peringatan jika ada penyimpangan.⁷

Pengaruh juga merupakan tugas media sosial. Dalam situasi seperti ini, media harus memutuskan masalah apakah akan ditampilkan atau diabaikan. Banyak masalah berkembang di masyarakat. Keputusan yang dibuat oleh media sosial dalam memilih masalah ini dapat memengaruhi cara masyarakat melihat masalah apa yang dianggap memiliki nilai tertinggi. Selain itu, sebagai produk pers, media sosial dapat secara langsung memengaruhi kebijakan publik. Ini selaras dengan teori David Easton bahwa ada input, proses, dan output dalam pengambilan kebijakan publik.

Media sosial, pilar demokrasi, menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam daftar masalah sosial yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui proses input. Oleh karena itu, media sosial sangat dibutuhkan oleh negara dan individunya karena, di satu sisi, media sosial membutuhkan negara untuk membantu menginventarisir masalah sosial, dan di sisi

⁷ Menurut Dedi Sahputra, Politik Media Masa Dalam Dinamikanya dengan Pendapat Umum, dalam Semesta Rakyat Merdeka, 2019, halaman 19. Dibuka pada 30 April 2024.

lain, media sosial membutuhkan individu untuk menginventarisir masalah sosial, membutuhkan individu untuk membantu menginventarisir masalah sosial, masyarakat dan *stakeholder* membutuhkan media sosial untuk menyuarakan keinginan mereka sehingga pemerintah dapat memahaminya.

Karena pentingnya kebijakan publik bagi masyarakat, media sosial harus memberikan informasi yang imbang dengan mempertahankan prinsip *cover* kedua sisi. Ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Jurnalistik, yang menyatakan bahwa media sosial adalah alat kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat pluralis demokratis, media seharusnya berfungsi sebagai arena publik terbuka yang memungkinkan saluran komunikasi terbuka yang dapat mewakili suara golongan minoritas.

Dalam hal fungsi media sosial sebagai pilar demokrasi dan fungsi mereka dalam mengawasi dan memengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga eksekutif, yang berlaku di bawah dan di seluruh negara, seperti satunya diterapkan pada sistem sistem satu-satunya sistem yang digunakan untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga membutuhkan pengawasan dari berbagai sumber, termasuk media sosial, karena mereka memberikan layanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Ini juga berlaku untuk pemerintah Kota Jambi. Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi berfungsi sebagai pusat kegiatan politik, birokrasi, pemerintahan, dan ekonomi. Akibatnya, Kota Jambi berfungsi sebagai barometer tata kelola pemerintah daerah untuk wilayah lain di Provinsi Jambi. Kota Jambi memiliki luas 252 km dan populasi sekitar 687.976 orang, menurut data BPS.

Dengan populasi sebanyak itu, Pemerintah Kota Jambi membutuhkan konsistensi, efisiensi, responsibilitas, dan efektivitas yang baik, terutama dalam hal sistem kebijakan publik.⁸

Kota Jambi memiliki luas 252 km dan populasi sekitar 687.976 orang, menurut data BPS. Dengan populasi sebanyak itu, Pemerintah Kota Jambi membutuhkan konsistensi, efisiensi, responsibilitas, dan efektivitas yang baik, terutama dalam hal sistem kebijakan publik.

Penulis menyatakan bahwa ada sejumlah masalah tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Jambi. Misalnya, Gebyar Operasi Eksekusi Serentak PLN Kota Jambi pada pemeliharaan konstruksi Jaringan di ULP Telanaipura, proyek perbaikan jalan di Talang Banjar yang menyebabkan jalan menjadi rusak dan becek, dan pedagang pasar siku di pasar los kota jambi yang mengalami kebocoran saat hujan mengguyur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan di Kota Jambi, masyarakat sipil harus memberikan pengawasan yang efektif. Media sosial sendiri dapat melakukan pengawasan ini.

Di Kota Jambi sendiri, ada beberapa platform media sosial yang terus beroperasi, salah satunya adalah Instagram Kabar Kampung Kito Jambi. Setidaknya ada puluhan situs media sosial lokal dan online di seluruh Kota Jambi, memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tertulis. Diharapkan situs media sosial dapat

⁸ Untuk mengetahui tentang kondisi geografis dan demografis Kota Jambi, Anda dapat mengunjungi situs resmi BPS Kota Jambi di www.BPSKotaJambi.go.id pada tanggal 30 April 2024.

berfungsi sebagai kekuatan sipil untuk menginformasikan dan melakukan sosial-kontrol terhadap berbagai kebijakan publik Kota Jambi.

Contoh pemberitaan tentang pengawasan kebijakan oleh media sosial di Kota Jambi yaitu: 1) Instagram Kabar Kampung Kito Jambi pada 09 Mei 2024 melaporkan bahwa Program GOES'R adalah inisiatif untuk meningkatkan keandalan pasukan listrik PLN kepada pelanggan melalui pemangkasan dan penebangan pohon (ROW) di dekat jaringan PLN, yang dapat menyebabkan gangguan dan kegiatan pemeliharaan kontruksi jaringan. 2) PLN ULP Telanaipura mengirimkan 30 orang untuk kegiatan GOES'R. Mereka dibagi menjadi 4 tim ROW dan 2 tim pemeliharaan, dan titik fokus yang ditargetkan adalah Penyulang Manggis dan Kokoa di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, yang telah ditetapkan untuk perawatan berdasarkan risiko oleh Regu Pelayanan Teknik PLN.

Bapak Ediwan, Manager PLN UP3 Jambi, bersama dengan Asman Jaringan PLN Jambi, Tim Leader Pemeliharaan, Tim Leader Teknik, dan Tim K3 ULP Telanaipura, serta pengawasan K3 dan pengawasan dari PT. Bangun Sejahtera Abadi Jaya, langsung mengawasi acara tersebut. Bapak Ediwan tegas menyatakan, "Kegiatan ini juga takan lepas dari fungsi serta aparat desa serta fungsi masyarakat kalau desa dan tempat tinggal kita mau maju dan jarang ada gangguan listrik, maka ijinakan petugas untuk memangkas dan menebang pohon agar kedepannya pasokan listrik kita aman dari gangguan pohon". 3) Instagram Kabar Kampung Kito Jambi pada 11 Mei 2024 melaporkan bahwa proyek perbaikan jalan di Talang Banjar dan sekitarnya dapat menyebabkan kerusakan jalan dan becek di beberapa titik. Warga sekitar mengatakan bahwa "warga setempat yang melintas di jalan tersebut

mengharapkan segera diselesaikan dalam waktu dekat, karena merasa terganggu adanya kemacetan, kerusakan jalan makin parah, dan warga yang berjualan di sekitar daerah situ merasa terganggu."

Instagram Kabar Kampung Kito Jambi melaporkan pada tanggal 1 Mei 2024 bahwa pedagang di pasar siku dan los mengalami kebocoran karena hujan. Mereka mengatakan, "Warga pasar harapannya adanya perhatian dari pihak terkait dalam masalah yang sedang mereka alami, mereka mengeluh bawasanya menyewa tempat dengan harga sewaan tinggi tapi tidak sesuai fasilitas yang ada."

Tabel 1.1
Daftar Contoh Capturing Media Sosial Pengawas Kebijakan
Kota Jambi

No.	MEDIA Instagram	CAPTURE	KOMENTAR
1.	Kabar Kampung Kito Jambi		Disukai oleh adammojo304 dan lainnya Kabarkampungkito.jbi Okeay Operasi Eksekusi Serentak Berdasarkan Risk Based (GOES'R) pada pekerjaan pemeliharaan jalur distribusi RCUW (Right of Way) dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan di ULP Telanapura. Kamis, (09/05/2024). Program GOES'R ini merupakan program peningkatan keamanan pasokan listrik PLN kepada pelanggan berupa eksekusi pemangkasan dan penanaman pohon (ROW) disekat jaringan PLN yang berpotensi menyebabkan gangguan, serta kegiatan pemeliharaan konstruksi jaringan. Pada kegiatan GOES'R tersebut PLN ULP Telanapura menurunkan 30 personel yang dibagi menjadi 4 Tim ROW dan 2 Tim Pemeliharaan, titik fokus yang menjadi target adalah Perhutangan Muaro dan Kocok di Kecamatan Muaro Kabupaten Muaro Jambi yang telah ditetapkan berdasarkan risk based maintenance oleh Regu Pelayanan Teknik PLN. Pada kegiatan GOES'R ini langsung diawasi Bapak Ediwah selaku Manager PLN ULP Jambi, Asman Jaringan PLN Jambi, Team Leader Pemeliharaan, Team Leader Teknik dan K3 ULP Telanapura dan Pengawas K3 Serta pengawas dari PT. Bangun Sejahtera Abadi Jaya. Bapak Ediwah mengatakan "Kegiatan ini juga takan lepas dari peran serta aparat desa serta peran serta masyarakat kalau desa dan tempat tinggal kita mau mau dan jarang ada gangguan listrik, maka lirikan petugas untuk memangkas dan menebang pohon agar kedepannya pasokan listrik kita aman dari gangguan pohon. Perbaikan-perbaikan konstruksi juga kami lakukan dalam kegiatan GOES'R ini, seperti konstruksi dan peralatan yang harus kita perbaiki dan di ganti. Bapak Ediwah menyebutkan "Penjualan adalah kunci dari keberhasilan bisnis, dengan kata lain hal ini berbanding lurus antara keamanan dan penjualan, apabila jaringan kita handal maka penjualan pun akan meningkat." ucap Ediwah. Lihat 1 komentar
2.	Kabar Kampung Kito Jambi		Disukai oleh retnoputrit dan lainnya Kabarkampungkito.jbi Semoga proyek perbaikan jalan di Talang Banjar dan... Komentar pakmadani 3m @putrasugito aman jok es lur Balas · Lihat terjemahan Sembungkan balasan herem_1005 3m Ya ini proyek tolga stail kan di mkr apa org nak jualan jd trfntt lalu merugi gara" proyek ipat ni. Balas kabarkampungkito.jbi 2m · Pembeda Bantuan, 1100 jyo kasan yang jualan jadi sepi juga Balas engim_ngh 2m ly pernyak at ni y lobang nyo dalam nisan ngipit Balas Tambahkan komentar untuk kab...
3.	Kabar Kampung Kito Jambi		Disukai oleh sunaka56 dan lainnya kabarkampungkito.jbi Kondisi Pedagang Pasar Siku Pasar Los Kota Jambi jika hujan melanda, kebocoran terjadi meskipun sudah diperbaiki, para pedagang berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk masalah yang sedang mereka hadapi Komentar arifwajambi 3m Lah lamo dak k loss lg...semenjak betario online Balas Lihat 1 balasan lainnya tenagagigiling_dian 3m Semoga diaganan kalla laris manis, rejeki mengalir deras seperti air hujan yg turun itu ya kk... amin ya Allah Balas seraya_yaya93 3m Pemerintah ne mau tau,tau nak restribusi ny ne...tau nak kewajiban bayar bulanan ba...derita org pasar,sepi pasar mano mau tau org to... Balas Tambahkan komentar untuk kab...

Fungsi Media Sosial Dalam Kebijakan Publik adalah subjek dari beberapa studi sebelumnya tentang subjek penelitian ini. Penelitian pertama, "Pengaruh Media Sosial Dalam Kebijakan Pendidikan", diterbitkan dalam jurnal oleh Toha Makhshun dan Khalilurrahman. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial memengaruhi kebijakan pendidikan. Media sosial adalah lembaga netral yang berhubungan dengan semua orang atau masyarakat banyak. Media sosial berfungsi untuk memberikan informasi, agenda, menghubungkan orang, mendidik, membujuk, dan menghibur.⁹

Penulis menganggap bahwa penelitian sebelumnya oleh Thoha Makshum terkait dengan topik yang akan penulis bahas: bagaimana media, khususnya media sosial, memengaruhi kebijakan publik pada tingkat institusi publik. Tetapi ada perbedaan antara penelitian Thoha dan apa yang hendak dikaji oleh penulis: penelitian Thoha berfokus pada upaya untuk mengawasi dan mempengaruhi perbaikan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana media sosial mengontrol dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Penelitian kedua, oleh Linda Mustika yang berjudul "Menakar Netralitas dan Idepedensi Media Massa Terhadap Kebijakan Publik" meneliti upaya Palopo Pos dan Seru!". Ya untuk menjadi media netral dan independen, tetapi keduanya tetap melakukan tugasnya sebagai kontrol sosial dan menyampaikan informasi

⁹ Toha Makhshun dan Khalilurrahman, 2018. Pengaruh Media Dalam Kebijakan Pendidikan, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, hlm. 7.

kepada masyarakat. Untuk menjadi media yang netral dan independen, ada beberapa hambatan. Misalnya, terkadang ada ketidakpahaman antara mitra atau narasumber dan perusahaan atau wartawan; komplain publik tentang berita yang tidak sesuai dengan perspektif masyarakat; dan upaya kedua media sosial untuk menjadi netral dan independen mempengaruhi keberlangsungan perusahaan dan wartawan.

Skripsi ketiga ditulis oleh Yovinus, "Fungsi Komunikasi Publik Media Sosial Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung". Menegaskan bahwa para pelaksana kebijakan harus menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas. Mereka harus memanfaatkan media sosial dengan baik. Pada dasarnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mendorong masyarakat sebagai sasaran kebijakan pembangunan untuk terlibat dalam pembuatan, kritik, dan akhirnya mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah dapat menggunakan sosialisasi sebagai sarana uji publik dalam situasi seperti ini tanpa harus melakukan interaksi fisik antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian keempat, yaitu Sukma Alam dalam Skripsi berjudul "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik". Penelitian ini menemukan bahwa upaya DPW PSI Jakarta untuk menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook dapat berdampak besar pada komunikasi politik online. Dengan mengunggah video dan foto dengan caption yang menarik, Anda mungkin mendapatkan banyak respons. Karena itu, partai politik sangat

membutuhkan media sosial. Diharapkan penelitian ini akan menemukan jawaban tentang bagaimana Proses kebijakan publik Kota Jambi diawasi oleh media-media di atas. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya, penulis ingin menyelidiki “***Fungsi Media Sosial Dalam Mengawasi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Jambi: Studi Kasus: Di Akun Instagram Kabar Kampung Kito***”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah tentang Fungsi Media Sosial dalam mengawasi kebijakan pemerintah kota:

1. Bagaimana fungsi media akun Instagram Kabar Kampung Kito Dalam mengawasi kebijakan publik pemerintah Kota Jambi?
2. Apakah yang menjadi hambatan media dalam mengawasi kebijakan publik pemerintah Kota Jambi untuk menciptakan demokrasi yang ideal?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Tujuan ini sangat penting untuk setiap kegiatan penelitian karena tujuan berfungsi sebagai tolak ukur dan target. Ini adalah tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana akun Instagram kabar kampung kito berfungsi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Kota Jambi.

2. Untuk mengetahui hambatan media dalam mengawasi kebijakan publik pemerintah Kota Jambi untuk menciptakan demokrasi yang ideal.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoretis

Bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu pemerintahan, khususnya tentang fungsi media sosial, dan dapat digunakan sebagai contoh untuk studi yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media sosial membantu mengawasi kebijakan pemerintah Kota Jambi.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Teori Kontrol Sosial

Media sosial, menurut Van Dijk dan Nasrullah, adalah platform media yang berpusat pada eksistensi pengguna dan memungkinkan mereka bekerja sama dan berkreasi. Media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang membangun hubungan sosial dan hubungan antar pengguna. Media sosial memiliki banyak dinamika sosial, yang memungkinkan komunikasi terbuka dengan berbagai orang dengan berbagai latar belakang dan

kepentingan. Selain itu, media sosial adalah cara yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai hal.

Menurut Howard dan Parks, media sosial terdiri dari tiga komponen: infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi. Isi media dapat berupa pesan pribadi, berita, ide, dan produk budaya dalam bentuk digital. Orang, organisasi, dan institusi yang memproduksi dan mengonsumsi isi digital ini. Kotler dan Ketler juga menyatakan bahwa media sosial adalah platform di mana pengguna berbagi teks, gambar, suara, dan video, baik dengan perusahaan maupun dengan orang lain. Pernyataan Carr dan Hayes mendukung pendapat tersebut.

Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan mempresentasikan diri dengan khalayak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meningkatkan nilai konten yang dibuat oleh pengguna dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Media sosial sangat digunakan dalam semua bidang, termasuk politik, bisnis, media, periklanan, kepolisian, dan layanan gawat darurat. Media sosial telah menjadi penting untuk mendorong diskusi, tindakan, dan pemikiran tentang masalah sosial.

Teori Komunikasi Massa Pengaruh media masa banyak mengkaji tentang segmen media (suatu program, tipe program, macam isi media tertentu) mempengaruhi individu. Dalam kajian ini, penulis merujuk pada teori Brian Mc Nair tentang komunikasi politik. Komunikasi politik termediasi media tradisional seperti media sosial menggambarkan bagaimana elemen-elemen

dalam komunikasi politik saling berkaitan satu sama lain. Elit yang terdiri atas organisasi politik, organisasi publik, partai, dan utamanya pemerintah menggunakan media untuk menyampaikan programnya kepada warga negara (citizen). Disisi lain, media juga memfasilitasi warga negara untuk menyampaikan opininya kepada elite negara yang berguna untuk keberlanjutan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pesan dari elite ataupun dari pihak warganegara akan dikemas media tradisional melalui liputan, editorial, komentar, dan analisis berita kepada publik.¹⁰

Adapun konsep fungsi media yang dapat dijadikan acuan untuk melihat keperkasaan media masa dalam kaitannya dengan aktivitas politik di antaranya:

1.5.1.1 Fungsi Media Sosial Bagi Masyarakat

Berdasarkan teori dari McNair. Salah satu tuntutan dari public sphere adalah menempatkan media sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapatnya serta pendapat mereka agar dapat diakomodasi. Oleh karena itu, McNair menambahkan bahwa agar dapat terciptanya demokrasi yang ideal, maka idealnya media harus memiliki fungsi-fungsi berikut :

1. Fungsi *Monitoring*

Fungsi monitoring memiliki maksud bahwa media memberikan informasi tentang apa yang sedang berlangsung di masyarakat.

¹⁰ Brain McNair, 1995, *An Introduction in Political Communication*, Routledge. hlm, 5.

2. Fungsi Mendidik (Education)

Memberikan kejujuran atas makna dan signifikansi dari fakta-fakta yang terjadi. Jurnalis harus mampu menjunjung objektivitasnya karena *value* yang mereka miliki sebagai ‘pendidik’ tergantung dengan wacana atau isu yang mereka pilih untuk dipublikasikan.

3. Platform

Idealnya media juga dapat memberikan platform terhadap diskursus politik publik, memfasilitasi dan mengakomodasi opini publik dan mengembalikan opini tersebut kepada publik, termasuk didalamnya memberikan kesempatan atau ruang kepada pendapat-pendapat yang saling berlawanan tanpa mengurangi esensi demokrasi.

4. Fungsi Watchdog

Memiliki maksud untuk mempublikasikan kinerja institusi politik dan institusi pemerintahan dan menciptakan transparansi pada institusi-institusi tersebut. Dengan demikian, semua warga negara pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi paham terhadap segala kinerja mereka.

5. Fungsi Advocacy

Media menjadi channel untuk advokasi politik, contohnya partai atau insitusi politik. Media dapat menjadi alat untuk mengartikulasikan kebijakan dan program mereka kepada khalayak. Oleh karenanya,

media perlu bersifat terbuka terhadap semua organisasi politik tanpa mengabaikan prinsip netralitasnya.¹¹

Fungsi advokasi menjadi penting untuk dimiliki oleh stakeholder media sosial mengingat posisinya sebagai alat untuk memberikan komunikasi dan informasi yang sedang terjadi kepada masyarakat. Dengan demikian, maka media sosial juga bisa menjadi alat bagi pemerintah maupun organisasi politik untuk memberikan informasi seputar kebijakan, program, dan rencana kinerja mereka kepada masyarakat. Namun demikian, media sosial juga harus memegang prinsip *cover both side* yang artinya media sosial mesti mengartikulasikan informasi secara berimbang dan netral dari kedua sisi pihak.

1.5.1.2 Hambatan Media Sosial dalam Menciptakan Demokrasi yang Idel

Diluar dari fungsi media sosial untuk menciptakan demokrasi ideal. Media sosial itu sendiri dihadapkan dengan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam fungsi fungsinya. McNair menjelaskan bahwa media dan demokrasi juga tidak terlepas dari institusi institusi terait yakni struktur demokrasi dan lingkungan media sosial disekelilingnya. Bahwa kedua institusi ini harus berfungsi sempurna. Sedangkan institusi institusi itu sendiri masih jauh dari kata ideal. Seperti, masyarakat yang apatis terhadap terciptanya demokrasi, tidak adanya pilihan yang murni atau prosedur demokrasi yang

¹¹ *Ibid.* Hlm 23.

biasanya mengandung *anomaly* dan bias yang menjadikannya jauh dari sifat demokratis.

Sedangkan bagi media sosial hambatan yang dihadapinya untuk dapat menciptakan demokrasi yang ideal adalah:

1. Masalah kapitalisme dan kekuasaan

Media sebagai sumber informasi bagi masyarakat telah diintervensi oleh pendongkrak kekuatan politik dan ekonomi (pemegang kekuasaan politik dan ekonomi). Sehingga, apa yang dianggap sebagai informasi politik merupakan produk dari beberapa proses mediasi yang masyarakat itu sendiri tidak mengetahuinya.

2. Media sebagai alat untuk memproduksi persetujuan

Media seringkali tertarik untuk berperan mengawasi politisi. Disisi lain, media juga bersekongkol dengan politisi untuk menyembunyikan informasi sensitif. Dimana masyarakat hanya mengetahui satu bagian saja, bukan keseluruhan dari informasi yang sebenarnya. Sehingga masyarakat menganggap hal yang diterima adalah baik dan menyetujuinya.

3. Keterbatasan obyektifitas

Etika jurnalistik profesional mengenai obyektifitas media dalam mengemukakan informasi keruang public dengan berbagai alasan, reportase politik, media itu bias dan cacat. Media menjadi bagian yang memihak, bukan lagi obyektif dan netral.

1.5.2 Teori Kebijakan Publik

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata "politik" dan "kebijaksanaan" masih tidak memiliki arti yang pasti. Historis menunjukkan bahwa kata "kebijakan" berasal dari kata "politik", yang berasal dari bahasa Inggris. Kata ini berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti "negara kota", dan kemudian berkembang menjadi kata Latin politea. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah keputusan yang sudah mantap atau "keputusan yang tetap" yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Keputusan ini didasarkan pada pilihan atau pertimbangan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana yang sesuai.

Thomas R. Dye memberikan konsep dasar tentang kebijakan-yaitu, apa yang pemerintah lakukan dan apa yang tidak lakukan tetapi konsep ini membutuhkan penjelasan yang lebih dalam karena masih merupakan teori dasar. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah harus memiliki landasan dan alasan yang objektif untuk membuat kebijakan publik Selanjutnya, David Easton membahas kebijakan publik dalam bukunya *The Political System*. Menurutnya, kebijakan publik adalah pembagian kekuasaan kepada seluruh masyarakat sehingga hanya pemerintah yang dapat melakukan tindakan tertentu.¹²

¹² Basri Seta, *Sistem Politik Indonesia*, hlm. 6

David Easton menawarkan sistem politik Easton, alur pembentukan yang dia buat untuk membuat kebijakan publik. Untuk menghasilkan keputusan kebijakan yang baik, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, harus ada cara untuk menerima aspirasi masyarakat, mengungkapkan kepentingan, menggabungkan kepentingan, dan masukan masyarakat. Proses kedua adalah proses, di mana aspirasi masyarakat diserap oleh pemerintah melalui badan birokrasinya, dan kemudian ada proses pembuatan kebijakan di tingkat eksekutif dan legislatif.

Kebijakan adalah hasil dari proses sistem politik, kata Easton. Dia juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pembuat kebijakan dan lingkungan sekitar untuk menjaga warga negara berpartisipasi. Ini berarti bahwa saat membuat kebijakan, mereka harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat selaras dengan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak terbalik dari keinginan masyarakat.

James E. Anderson menjelaskan lebih lanjut teori David Easton tentang kebijakan publik, yang merupakan hasil dari sistem politik, dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan badan berwenang yang berdampak pada hal-hal berikut:

- 1) Kebijakan harus memiliki tujuan, dan segala tindakan yang berhubungan dengannya juga harus berorientasi pada tujuan tersebut.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar apa yang masih dimaksudkan oleh pemerintah.

- 4) Kebijakan publik bisa bersifat politik, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah tertentu dan juga dapat bersangkut pautkan dengan politik.

Pada dasarnya, kebijakan publik dibuat oleh pemerintahan yang sah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam bentuk aturan otoritatif untuk memenuhi kepentingan umum. Kebijakan publik hanya dapat dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang, yang membedakan mereka dari kebijakan swasta. Agar produk kebijakan publik dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, pembuatan kebijakan publik membutuhkan kalkulasi, strategi, dan spekulasi yang matang. Oleh karena itu, akses ke sumber daya pengetahuan, informasi data, komunikasi, dan penggunaan analisis kebijakan sangat penting dalam praktik pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, Anderson menjelaskan proses pembuatan kebijakan yang ideal sebagai berikut:

- 1) Temukan Masalahnya

Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat mana masalah sosial yang mendesak yang harus diprioritaskan, karena banyak masalah dapat ditemukan dan bahkan menjadi rumit dalam kehidupan masyarakat. Hal ini harus dilakukan karena selama proses pembuatan kebijakan publik, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengambil keputusan sendiri tentang semua masalah. Oleh karena itu, proses identifikasi masalah berfungsi sebagai alat untuk menyaring masalah yang beredar di masyarakat menjadi masalah publik dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya,

kopleksitas, kebutuhan segera untuk menemukan solusi, dan dasar ilmiah dari masalah tersebut. Agar masalah benar-benar menjadi masalah publik yang layak diperhatikan, dentifikasi masalah juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.¹³

2) Konsep Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah fase di mana semua masalah dan informasi yang dikumpulkan masyarakat diidentifikasi lebih lanjut melalui berbagai diskusi, perundingan, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan juga melihat siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta mencari solusi untuk masalah pembangunan.¹⁴

3) Adopsi Aturan

Semua opsi, masukan, dan rumus diskresi yang dibuat pada tahap formulasi dikumpulkan pada tahap adopsi. Setelah itu, pemerintah atau badan yang berwenang membuat keputusan dengan memilih salah satu rumusan kebijakan yang tersedia. Pada dasarnya, lembaga legislatif melakukan proses ini dengan mempertimbangkan kebutuhan, relevansi, dan subtansi materil dari rumusan kebijakan tersebut.

¹³Konsep dan Kajian Perumusan Kebijakan di Sektor Publik, Muadi Sholeh, Jurnal Review Politik, Vol. 06, No. 2, 2016, halaman 23. Jurnal tersebut dapat diakses pada 19 Juli 2024 melalui URL berikut: https://www.academia.edu/40765874/KONSEP_DAN_KAJIAN_TEORI_PERUMUSAN_KEBIJAKAN_PUBLIK//

¹⁴Taufiqurahman menulis buku berjudul "Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negaera Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan", yang diterbitkan di Jakarta oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo pada tahun 2014. Buku tersebut berisi halaman 17 tentang masalah ini.

4) Pelaksanaan Kebijakan

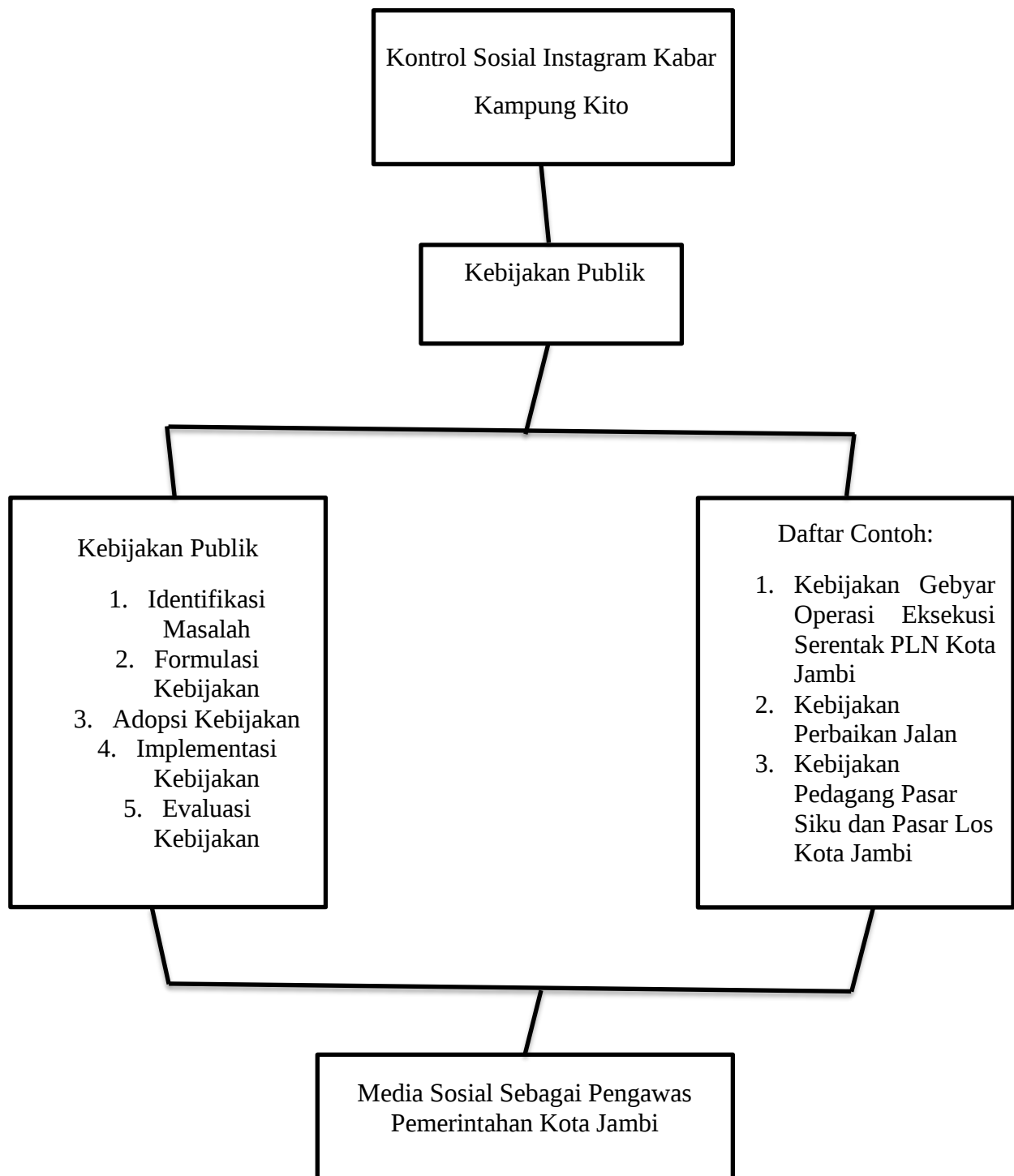
Setelah kesepakatan tentang diskresi kebijakan, selanjutnya adalah menginterpretasikan kebijakan ke dalam tahapan pelaksanaan. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan nasional dan regional, melaksanakan kebijakan. Pemerintah harus merencanakan, mengorganisasikan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efisien.

5) Evaluasi Politik

Tahap evaluasi melibatkan penilaian implementasi kebijakan. Tahap ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana perubahan pasca kebijakan dilakukan, apa dampak kebijakan tersebut, siapa yang dirugikan, dan siapa yang duntungkan. Evaluasi juga mengidentifikasi apakah ada masalah baru dengan kebijakan pemerintah sebelumnya.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah kualitatif, yang berarti peneliti terlibat langsung dalam penelitian sehingga mereka dapat menafsirkan dan menguraikan data tentang keadaan di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian sistematis dan ilmiah.¹⁵

Penelitian kualitatif melihat masalah dari sudut pandang manusia. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; oleh karena itu, mereka tidak dapat mengumpulkan data dengan kuesioner. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan tentang populasi; sebaliknya, mereka dimaksudkan untuk mempelajari karakteristik individu atau kelompok yang diteliti.¹⁶

1.7.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang objek yang akan diteliti, tempat penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di daerah di kota Jambi, yang berada di provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui tentang fungsi media sosial akun

¹⁵ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu 2006.hlm.205

¹⁶ *Ibid*.hlm.205

Instagram Kabar Kampung Kito dan karena peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di sana.

1.7.3 Fokus Penelitian

Batasan masalah yang digunakan peneliti untuk membatasi kemampuan mereka adalah fokus penelitian. Penelitian berfokus pada mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan melakukan penelitian dengan cara yang bias, menambah, dan mengubah. Selain definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, fokus penelitian juga mencakup indikator atau dimensi penelitian. Sebaliknya, dimensi-dimensi ini akan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan.¹⁷

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian, Fokus penelitian ini adalah fungsi media sosial: studi kasus di akun instagram kabar kampung kito dalam pengawasan kebijakan publik pemerintah Kota Jambi. Hal ini disebabkan fakta bahwa fungsi media dalam pengawasan Kebijakan publik pemerintah Kota Jambi belum memenuhi syarat dengan baik. Karena kurangnya keterlibatan masyarakat, masalah ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

¹⁷ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, p. 31.

1.7.4 Sumber Data

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Data primer adalah kumpulan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber penelitian, seperti informan, responden, atau wawancara.¹⁸ Peneliti menggunakan catatan lapangan dan wawancara sebagai sumber data utama. Mereka juga menggunakan observasi, yang merupakan hasil pengamatan visual tentang bagaimana media sosial mempengaruhi kebijakan publik pemerintah Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh dari sumber pertama disebut data sekunder; dalam kasus ini, peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain.¹⁹ Dokumen kepustakaan, buku, jurnal, dan sumber internet lainnya dapat menjadi sumber data.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Peneliti akan menggunakan teknik sampel purposive atau bertujuan, yang didasarkan pada pertimbangan khusus, untuk menemukan informan. Peneliti memilih informan atau sampel yang benar-benar memahami topik penelitian.

¹⁸ Nanang Martono, *Op.cit*, hlm. 65

¹⁹ *Ibid.* hlm. 66

Sebenarnya, metode ini termasuk dalam teknik sampel berpeluang, juga dikenal sebagai teknik sampel probabilitas, di mana peluang untuk dipilih sebagai anggota sampel sama untuk setiap anggota populasi.

Informasi ini dipilih untuk mempelajari cara media sosial memengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Kota Jambi. Namun, ada kemungkinan peneliti dapat menggunakan teknik snowball untuk mendapatkan lebih banyak informan untuk penelitian mereka.

Tabel 1.2

Informan

No.	Informan	Alasan
1.	Kantor Staf Bidang Hukum Walikota Jambi	Karena Walikota Jambi tidak dapat hadir, tugas tersebut diberikan kepada staf bidang hukum. Staf bidang hukum adalah bagian dari organisasi yang mengatur kebijakan, dalam hal ini pemerintahan Kota Jambi, dan keterangannya dianggap penting untuk hubungan antara pemerintah daerah dan media sosial.
2.	Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Kota Jambi	Karena Diskominfo memiliki otoritas untuk mengakses data informasi dan mengawasi data lokal di media sosial.
3.	Pemimpin atau perwakilan dari media akun instagram kabar kampung kito	Karena akun Instagram Kabar Kampung Kito adalah subjek penelitian ini, diperlukan penjelasan tentang hubungan media sosial dengan pemerintah daerah Kota Jambi dalam hal kebijakan daerah.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menemukan data dengan menggunakan tiga metode: observasi, wawancara, dan kepustakaan atau dokumen. Untuk digunakan sebagai bukti penelitian, semua teknik ini diperlukan untuk menggali informasi dan mengumpulkan data. Berikut adalah ringkasan dari ketiga hal ini:

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, Peneliti bertanya kepada informan atau responden secara lisan.²⁰ Karena jenis wawancara ini termasuk dalam kategori, peneliti memilih jenis wawancara semi-struktur untuk melakukan wawancara dan dapat dilakukan dengan lebih bebas daripada wawancara terstruktur.

Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendiskusikan masalah secara terbuka dan meminta pendapat dan pendapat mereka. Selama wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikatakan informan.²¹

b. Observasi

Memerhatikan fenomena di lapangan dengan peneliti menggunakan kelima menggunakan indranya (sensasi, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) dan menggunakan alat atau perangkat, serta merekamnya untuk tujuan penelitian

²⁰ Menurut Nanang Martono, Op.cit., halaman 362

²¹Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif oleh Sugiyono (Bandung: Alfabeta, 2017) halaman 233.

disebut observasi atau pengamatan. Pertanyaan dan tujuan penelitian menentukan temuan tersebut.²²

c. Dokumentasi

Dokumen pemerintah, hasil penelitian, buku harian, rekaman video, laporan, dan sebagainya adalah contoh dokumen pengumpulan data yang mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan subjek penelitian.²³

1.7.7 Metode untuk Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan, memilah-milah, menemukan pola (menemukan patter), menemukan apa yang penting dan diperlukan, menguji kembali (verifikasi), dan sampai pada kesimpulan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini akan diolah dengan teknik deskriptif-analitik. Situasi di lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif untuk mengurangi, menyajikan, menarik kesimpulan, dan memverifikasi data.²⁴

1.7.8 Keabsahan dan Triangulasi Informasi

Triangulasi menguji data hasil penelitian untuk keabsahan dan kebenaran dengan berbagai teknik. Triangles data, penelitian, teori, metode, dan lingkungan

²² *Ibid.*

²³ Nanang Martono, et al., p. 80

²⁴ <https://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>

adalah lima tipe yang umum digunakan. Peneliti akan menggunakan triangulasi data, yang berarti menggunakan berbagai sumber informasi untuk mengevaluasi validitas data tentang fenomena atau gejala sosial yang dibahas dalam penelitian ini. Triangulasi adalah pendekatan yang paling sering digunakan oleh peneliti karena dianggap paling mudah digunakan. Dimungkinkan untuk menggunakan triangulasi ini untuk memverifikasi kebenaran data dengan menggunakan dokumen saat ini.²⁵

²⁵ Ibid.